

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN
JAKABARING KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : M. Bram Fernando

NIM : 222016012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TIDAK TERCAPAINYA
TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN
JAKABARING KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : M. Bram Fernando

NIM : 222016012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Bram Fernando
NIM : 22 2016 012
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Analisis Faktor – faktor Penghambat Tidak Tercapainya Target
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenarann dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



M. Bram Fernando

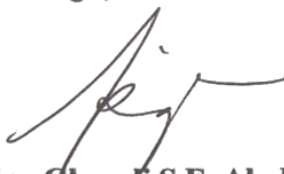
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor – faktor Penghambat Tidak Tercapainya
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan Di Kecamatan Jakabaring Kota
Palembang
Nama : M. Bram Fernando
NIM : 22 2016 012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 29 Agustus 2020

Pembimbing I,



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

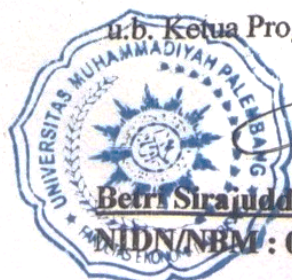
Pembimbing II



Saekarini Yuliachtri, SE., M.Si
NIDN/NBM : 0211078301

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan.

Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang
lain) dan kepada Tuhan, berharaplah

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Kamu tidak bias kembali dan mengubah masa lalu,

Maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat

Kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

(Penulis)

PERSEMBAHAN :

Terucap syukur kepada Allah SWT

skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu
Mendoakanku.
- ❖ Saudara Perempuanku serta keluarga
Tercinta lainnya.
- ❖ Dosen Pembimbingku
- ❖ Sahabat dan Teman – temanku
- ❖ Almamaterku

PRAKARTA



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Faktor- faktor Penghambat Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Samsul Arif dan Sumarti yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, member semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina Ghazali S.E.,Ak.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Saekarini Yuliacthri S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran – saran dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosalina Ghazali S.E.,Ak.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliacthri S.E.,M.Si selaku pembimbing skripsi.
6. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si.AK selaku pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Pegawai di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Saudara-Saudariku yang telah banyak membantu dan memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam skripsi ini .

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2020

Penulis

M. Bram Fernando

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKARTA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak	12
3. Sistem Pemungutan Pajak	12

4. Pengelompokkan Pajak	13
5. Pajak Daerah.....	15
6. Macam-Macam Pajak Daerah	16
7. Pengertian PBB (P2).....	16
B. Penelitian sebelumnya	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasional Variabel	37
D. Populasi Dan Sampel.....	38
E. Data Yang Diperlukan	39
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah	44
2. Struktur Organisasi.....	46
3. Aktivitas Badan Pengelolaan Pajak Daerah	46
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	49
5. Visi dan Misi	55
6. Gambaran Umum Responden.....	56
7. Rekapitulasi Jawaban Responden.....	57

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
1. Pembahasan Tentang Faktor Perlawanan Pasif.....	58
2. Pembahasan Tentang Faktor Perlawanan Aktif	66
C. Hasil Pembahasan.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	
Kecamatan Jakabaring	7
Tabel I.2 Jumlah WP yang terdaftar di Kecamatan Jakabaring	8
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	34
Tabel III.1 Operasional Variabel	37
Tabel III.2 Uraian Sampel yang Di ambil per kelurahan tahun 2019	39
Tabel IV.1 Tingkat Pengambilan Kuesioner	56
Tabel IV.2 Uraian Sampel yang Di ambil per kelurahan tahun 2019	57
Tabel IV.3 Rekapitulasi Jawaban Faktor Perlawanan Pasif	57
Tabel IV.4 Rekapitulasi Jawaban Faktor Perlawanan Aktif	58
Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 1	58
Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 2	59
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 3	60
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 4	61
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 5	62

Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 6	63
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 7	64
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 8	65
Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 9	66
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 10	67
Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 1	68
Tabel IV.16 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 2	69
Tabel IV.17 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 3	70
Tabel IV.18 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 4	71
Tabel IV.19 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 5	72
Tabel IV.20 Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan 6	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Surat Bukti Selesai Penelitian
- Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat Brevet
- Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran
- Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 6 : Fotocopy Sertifikat Magang
- Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 : Plagiarism Checker
- Lampiran 9 : *Abstract*
- Lampiran 10 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 11 : Biodata Penulis

ABSTRAK

M. Bram Fernando /222016012/2020/ Analisis Faktor – faktor Penghambat Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan faktor – faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, yaitu (1) Kondisi perekonomian dan psikologis wajib pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, (2) Lingkungan sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, (3) Kondisi moral masyarakat dapat berpengaruh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, (4) Wajib pajak sering kali lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Target Penerimaan PBB, Kesadaran Wajib Pajak.

ABSTRACT

M. Bram Fernando / 222016012 / Inhibiting Factorial Analysis of Unachieving Target Revenue From Rural and Urban Land Building Taxes in Jakabaring District, Palembang.

This research is aimed at determining the inhibiting factors of not achieving the target of land and rural tax revenue in rural and urban buildings in the Jakabaring District of Palembang. The type of this research was descriptive research. The data used in this research was primary data. Data collection methods used were through questionnaire documentation and interview techniques. The analysis technique used was a qualitative analysis. The results of the analysis in this research showed that the inhibiting factors of not achieving the target of land and building tax revenue for rural and urban areas in Jakabaring District, Palembang were as follows: (1) The economic and psychological conditions of taxpayers influenced taxpayers in paying taxes, (2) The social environment influenced taxpayer compliance in paying taxes, (3) The moral condition of society influenced paying land and building taxes, (4) Taxpayers often forgot to pay land and building taxes on time.

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax, PBB Revenue Target, Taxpayer Awareness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam ataupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di setiap sektor yang ada, salah satu masalah terbesar yaitu masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Pajak merupakan penghasilan negara yang berperan penting dalam sektor pembangunan negara khususnya pembangunan daerah dengan pendapatan yang cukup membantuperekonomian Negara.

Pajak dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan suatu tatanan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak supaya perekonomian negara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak dimulai dari melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan awal tahun 1984. Adanya pajak, pemerintah wajib memberikan imbalan kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, dengan membangun sarana dan prasarana kepentingan umum untuk masyarakat. Kewajiban wajib pajak kepada negara ialah dengan membayar pajak, sedangkan kewajiban negara kepada masyarakat atas pajak ialah dengan meningkatkan pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pengertian tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, ialah sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Berbagai macam jenis pungutan dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Salah satu pajak yang memiliki potensi sumber pendapatan negara kita adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Perspan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balasan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma biaya produksi barang-barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memberikan pengaruh pada pembangunan-pembangunan di Negara secara bertahap.

Menurut Siti (2017:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita adalah PBB yang masuk dalam kategori Pajak Negara harus terus digali dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang semua orang memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB yang sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang tentang pentingnya pajak, sampai pada metode pemungutan yang masih kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Sejak tahun 2011 penarikan PBB dilimpahkan dari pemerintah

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya yaitu UU Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU 12 Tahun 1994 dan yang terakhir yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak

lainnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diluangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya yang meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu pemasukan dari PBB-P2 ialah penerimaan pajak rumah hunian. Tidak semua yang mereka miliki seperti rumah hunian, lahan kosong, dan asset lain mereka bayar pajak, mereka hanya membayar pajak berupa rumah yang mereka huni, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup para wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiriska (2017), yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah penduduk berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas wilayah berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, luas bangunan berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Putri kemala (2018), yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2011 cukup efektif, tahun 2012, 2014, 2015 kurang efektif dan tahun 2013 tidak efektif berarti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum efektif. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain wajib pajak belum seluruhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan tunggakan pajaknya dan diharapkan kesadaran masyarakat agar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) kota Medan bias meningkat.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Berliana (2016), yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian yang menunjukkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih sangatlah kurang, karena kurang pemahaman wajib

pajak terhadap fungsi penerimaan pajak. Keefektifitasnya dari tahun 2011 sampai tahun 2013 meningkat meskipun belum mencapai target. Kontribusi terhadap pendapatan daerah sangatlah kurang, karena dari tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun bahkan tidak mencapai 50%.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang adalah suatu instansi yang bertujuan dalam mengumpulkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah dan pajak daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah, dalam mewujudkan keinginan tersebut, agar pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil maka dengan keputusan Wali Kota Palembang No.67 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 DISPENDA Kota Palembang yang berubah menjadi BPPD (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) berdasarkan PP No.18 Tahun 2016.

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatra setelah Medan. Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahan dengan luas wilayah 400,61 km² ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada 2018. Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang.

Kecamatan Jakabaring Palembang salah satunya yang memiliki wilayah cukup luas yaitu mencapai 11,722 hektar. Kecamatan ini di resmikan pada tahun 2017 lalu usai pemekaran dengan kecamatan seberang ulu I Palembang.

Kecamatan Jakabaring Palembang ini memiliki 5 kelurahan, diantaranya kelurahan 8 Ulu, 9/10 Ulu, 15 Ulu, Silaberanti dan kelurahan Tuan Kentang Palembang dengan potensi pajak yang tinggi. Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang merupakan salah satu tempat sumber penerimaan pajak di Kota Palembang. Data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang daritahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Jakabaring Periode 2015-2019

Tahun	Target		Realisasi		Presentase
	WP	Rp	WP	Rp	
2015	16.645	4.986.913.375	10.450	2.757.194.831	55%
2016	16.707	5.845.356.899	10.597	3.459.367.589	59%
2017	14.012	5.427.544.123	10.361	4.326.881.201	80%
2018	14.332	6.023.474.437	4.098	3.093.552.654	51%
2019	17.763	6.243.179.948	3.619	4.982.328.670	80%

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2020

Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kecamatan Jakabring
Per Kelurahan/Desa Tahun 2019

No	Kelurahan/Desa	Target		Realisasi	
		WP	Rp	WP	Rp
1	Silaberanti	3.980	3.471.268.056	584	1.789.261.718
2	Tuan Kentang	1.437	269.735.846	191	91.055.932
3	8 Ulu	1.781	1.888.930.100	406	615.639.290
4	15 Ulu	8.729	7.070.958.939	2.160	2.223.769.194
5	9-10 Ulu	1.836	522.713.879	278	262.602.536

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pelaksana bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak Daerah tentang penghambat penerimaan PBB seperti yang tertera di tabel I.1 yaitu penerimaan di tahun 2015 dan 2016 rendah disebabkan karena belum ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk objek pajak potensial seperti Opi Mall dan Opi Waterfun. Ditahun 2017 mengalami kenaikan karena ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) per m² tanah untuk objek pajak potensial seperti Opi Mall dan Opi Waterfun dan penyebab kenaikan lainnya di tahun 2017 masih membayar PBB ke Pemkot Palembang. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan karena Opi Mall dan Opi Waterfun membayar PBB ke Pemerintah kabupaten Banyuasin. Keduanya merupakan salah satu objek pajak potensial dengan tagihan PBB hampir mendekati 1 milyar rupiah. Ditahun 2019 penerimaan mengalami kenaikan karena kota Palembang di tahun 2019 melakukan penyesuaian NJOP per m² tanah atau bumi bangunan di seluruh wilayah Kota Palembang.

Menurutnya penghambat tidak tercapainya realisasi penerimaan pada kecamatan Jakabaring Kota Palembang disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar PBB-P2, tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, SPPT telah sampai kepada wajib pajak tetapi wajib pajak belum mampu untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa wajib pajak rumah hunian di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) penghambat diantara mereka yang tidak membayar pajak adalah malas, ada juga yang beranggapan bahwa membayar pajak khususnya PBB itu tidak penting, terlebih lagi tanpa membayar PBB-P2 mereka masih bisa mneghuni rumahnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Jakabaring Palembang dengan mengambil judul "**Analisis Faktor- faktor Penghambat Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor - faktor Penghambat Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor - faktor penghambat Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menelaah, mempelajari, menganalisa serta mempraktekan teori-teori yang didapat dan dipelajari di bangku perkuliahan tentang penghambat tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi Pemerintah Kota Palembang tentang Faktor-faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri Kemala, 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*
- Meiriska Febrianti, 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah*
- Berliana Esti Widari, 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya*
- Nur Riza Utiahman, 2016. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tumohon*
- Galih Wicaksono, 2017. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember*
- Mardiasmo, 2018 *Perpajakan*. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Resmi Siti, 2017 *Perpajakan (Teori dan Kasus)* Salemba Empat Jakarta
- SujarweniV. Wiratna, 2015 *Metodologi Penelitian (Bisnis & Ekonomi)*
PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016 *Perpajakan (Edisi Terbaru)*.ANDI OFFSET, Yogyakarta

Rahayu Siti Kurnia, 2017 *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains
, Bandung

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas UU No. 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi UU

Undang – undang No 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018. *Pajak Daerah*, Palembang

Peraturan WaliKota No 18 Tahun 2019. *Klasifikasi, Besaran Tarif, dan Ketetapan
Minimal PBB P-2 serta Pembebasan PBB P-2 atas Objek Pajak
dengan Ketetapan PBB sampai dengan Rp300.000*. Palembang